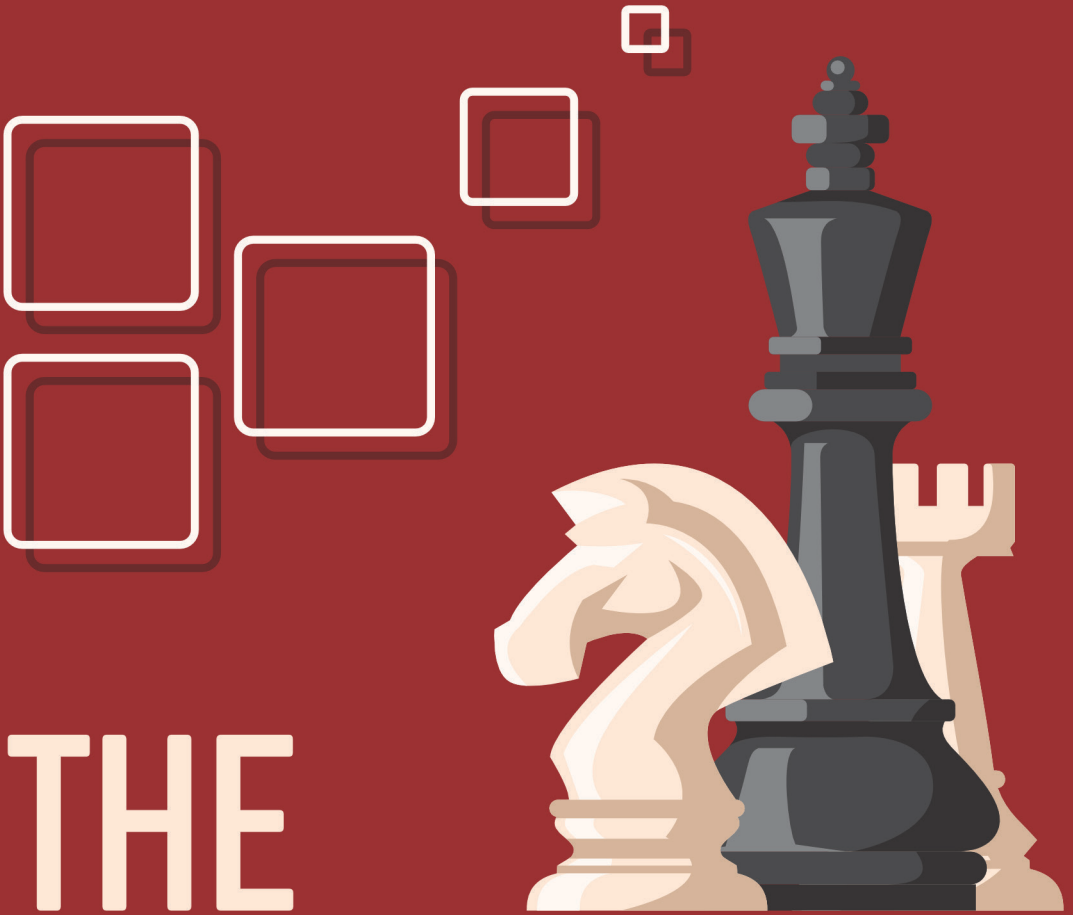


Khikmawanto
Korry El Yana

pi



THE GOVERNANCE GAME

Strategi dan Taktik
dalam Politik
Pemerintahan

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

THE GOVERNANCE GAME

Strategi dan Taktik dalam Politik Pemerintahan

Khikmawanto
Korry El Yana

Publica Indonesia Utama
2025

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

x + 126 Hlm; 15,5 X 23 cm

ISBN: 978-634-7120-74-8

Cetakan Pertama, Juni 2025

The Governance Game: Strategi dan Taktik dalam Politik Pemerintahan

Penulis : Khikmawanto, Korry El Yana

Penyunting : Risqi Isrotul Maghfiroh

Penata halaman : M. Nur Alfian Halim

Desain cover : Adji Azizurrachman

copyrights © 2025

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All rights reserved

Diterbitkan oleh:

Publica Indonesia Utama, Anggota IKAPI DKI Jakarta 611/DKI/2022
18 Office Park 10th A Floor Jl. TB Simatupang No. 18, Kel. Kebagusan,
Kec. Pasar Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta
publicaindonesiautama@gmail.com

KATA PENGANTAR

Dalam lanskap politik yang terus bergerak dan tak henti-hentinya kompleks, memahami mekanisme di balik pemerintahan bukan lagi sekadar kebutuhan akademis, melainkan sebuah keharusan praktis. Proses pengambilan keputusan, alokasi sumber daya, hingga respons terhadap krisis, semuanya adalah bagian dari sebuah “permainan” strategis yang melibatkan beragam aktor, kepentingan, dan kekuatan. Buku *“The Governance Game: Strategi dan Taktik dalam Politik Pemerintahan”* ini hadir sebagai panduan komprehensif untuk menyingkap seluk-beluk permainan tersebut.

Kami, sebagai penulis, menyadari bahwa politik pemerintahan sering kali dipersepsikan sebagai entitas yang kaku dan formal. Namun, melalui lensa analisis strategis, kami ingin menunjukkan bahwa di balik setiap undang-undang, kebijakan, atau keputusan, terdapat strategi dan taktik yang cermat dari para pemainnya. Dari kepala negara, partai politik, legislatif, birokrasi, hingga kelompok kepentingan dan media massa, setiap entitas memiliki tujuan dan menggunakan berbagai instrumen untuk memengaruhi arah tata kelola. Kami berupaya membedah bagaimana kekuatan dimainkan, negosiasi dilakukan, dan konsensus dibangun—atau dihancurkan—dalam arena kekuasaan.

Buku ini dirancang untuk tidak hanya memberikan pemahaman teoretis yang mendalam, tetapi juga contoh-contoh empiris yang relevan, khususnya dari konteks Indonesia, untuk mengilustrasikan bagaimana strategi-strategi ini beroperasi dalam praktik. Kami akan membawa pembaca menelusuri berbagai tahapan, mulai dari bagaimana isu-isu tertentu berhasil masuk ke dalam agenda publik, bagaimana kebijakan dirumuskan dan diimplementasikan, hingga bagaimana pemerintah beradaptasi dengan tantangan kontemporer seperti korupsi, polarisasi politik, dan disrupsi teknologi. Setiap bab adalah eksplorasi mendalam tentang dimensi strategis dalam setiap aspek tata kelola.

Kami berharap buku ini dapat menjadi sumber bacaan yang berharga bagi para mahasiswa ilmu politik, kebijakan publik, administrasi publik, serta siapa pun yang tertarik untuk memahami lebih jauh dinamika politik pemerintahan yang sesungguhnya. Semoga karya ini mampu membekali pembaca dengan lensa kritis untuk menganalisis, tidak hanya “apa” yang terjadi dalam pemerintahan, tetapi juga “mengapa” dan “bagaimana” itu terjadi, sehingga kita semua dapat menjadi pemain yang lebih cerdas dan berkontribusi pada tata kelola yang lebih baik.

Kami menyadari bahwa tidak ada satu pun karya yang sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca akan sangat kami hargai demi penyempurnaan di masa mendatang.

Terima kasih.

Tangerang, Mei 2025
Khikmawanto dan Korry El Yana

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
Bagian I: Memahami Arena Permainan (<i>Foundations of Governance</i>)	
Bab 1	
Mengapa ‘Permainan’? Memahami Politik Pemerintahan sebagai Arena Strategis	2
1.1 Politik sebagai Arena Strategis	3
1.2 Dinamika Politik: Kerja Sama dan Persaingan	6
1.3 Perspektif Teoretis dalam Politik Pemerintahan	9
1.4 Batasan Aturan Main dan Fleksibilitas Strategi	10
1.5 Studi Kasus: Koalisi Indonesia Maju (KIM Plus) dan Wacana Koalisi Permanen.....	11
Bab 2	
Pemain dan Kartu Mereka: Aktor dan Sumber Daya Kekuasaan dalam Pemerintahan.....	13
2.1 Dinamika Aktor Politik dalam Pemerintahan.....	14
2.2 Sumber Daya Kekuasaan dan Pengaruh dalam Politik.....	16
2.3 Dinamika Interaksi Aktor Politik.....	18
2.4 Studi Kasus: Kontribusi Modal Ekonomi dan Informasi dalam Kebijakan Pembangunan Infrastruktur	20
Bab 3	
Aturan Main: Konstitusi, Hukum, dan Norma dalam Membentuk Strategi.....	22
3.1 Konstitusi sebagai Landasan.....	24
3.2 Hukum dan Peraturan	26
3.3 Norma dan Konvensi	28
3.4 Strategi dalam Batasan Hukum dan Norma	30
3.5 Studi Kasus: Revisi UU TNI dan Peran Militer dalam Pemerintahan.....	32

Bagian II: Menguasai Taktik Permainan (*Tactics of Governance*)

Bab 4

Strategi Pemilihan dan Mobilisasi Dukungan: Memenangkan “Suara” dalam Berbagai Arena	34
4.1 Strategi Pemilihan (dalam Sistem Demokratis).....	36
4.2 Strategi Mobilisasi Dukungan di Luar Pemilu	38

Bab 5

Strategi Pembentukan Kebijakan: Memengaruhi Agenda dan Isi Kebijakan Publik.....	42
5.1 <i>Agenda Setting</i> : Bagaimana Isu-Isu Tertentu Masuk ke dalam Agenda Pemerintah.....	44
5.2 Formulasi Kebijakan: Taktik dalam Memengaruhi Isi Kebijakan	47
5.3 Legitimasi Kebijakan: Mendapatkan Dukungan Politik dan Publik	49

Bab 6

Strategi Implementasi dan Evaluasi Kebijakan: Mengelola Tindakan dan Mengukur Dampak.....	53
6.1 Strategi Implementasi Kebijakan.....	55
6.2 Taktik Birokrasi: Peran Birokrasi dalam Implementasi.....	57
6.3 Strategi Evaluasi Kebijakan	59
6.4 Contoh Kasus: Implementasi Kebijakan Perpajakan di Indonesia	62

Bagian III: Dimensi Strategis dalam Tata Kelola Pemerintahan (*Strategic Dimensions of Governance*)

Bab 7

Strategi Kepemimpinan Politik: Mengarahkan dan Memengaruhi dalam Sistem Pemerintahan	64
7.1 Gaya Kepemimpinan	65
7.2 Strategi Kepemimpinan Efektif	68

Bab 8

Strategi Komunikasi Politik: Membangun Narasi dan Memengaruhi Opini Publik.....	72
8.1 Model-Model Komunikasi Politik.....	73
8.2 Taktik Komunikasi Politik.....	76
8.3 Etika Komunikasi Politik.....	79

Bab 9

Strategi dalam Hubungan Antar Pemerintah dan Aktor Non-Negara: Kooperasi dan Kompetisi	83
9.1 Hubungan Antar Tingkat Pemerintahan (dalam Sistem Federal/Desentralisasi)	84
9.2 Hubungan dengan Aktor Non-Negara: Organisasi Internasional, Perusahaan Multinasional, dan OMS	87
9.3 Strategi Diplomasi dan Negosiasi Internasional	91

Bab 10

Tantangan Strategis dalam Tata Kelola Kontemporer: Korupsi, Polarisasi, dan Disrupsi Teknologi.....	94
10.1 Korupsi: Bentuk, Dampak, dan Strategi Pemberantasannya	95
10.2 Polarisasi Politik: Dampaknya terhadap Keputusan Kebijakan dan Penyelesaian Konflik	99
10.3 Disrupsi Teknologi: Dampak pada Tata Kelola dan Pemerintahan.....	103

Bab 11

Bermain untuk Masa Depan: Strategi untuk Tata Kelola yang Demokratis dan Efektif.....	108
11.1 Penguatan Institusi Demokratis	109
11.2 Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi.....	112
11.3 Promosi Tata Kelola yang Inklusif: Memperluas Lingkaran Pemain dalam “The Governance Game”	116
11.4 Strategi Adaptasi terhadap Perubahan Global: Menavigasi Arus Dunia dalam “The Governance Game”	119
Daftar Pustaka.....	123
Profil Penulis.....	125

**BAGIAN I: MEMAHAMI ARENA
PERMAINAN (*FOUNDATIONS OF
GOVERNANCE*)**

BAB 1

MENGAPA ‘PERMAINAN’? MEMAHAMI POLITIK PEMERINTAHAN SEBAGAI ARENA STRATEGIS

Politik pemerintahan sering kali disebut sebagai sebuah “permainan,” namun istilah ini lebih dari sekadar menggambarkan persaingan antaraktor politik. Dalam kenyataannya, politik adalah medan dinamis yang melibatkan berbagai aktor—baik individu, kelompok, atau institusi—yang berusaha meraih tujuan masing-masing. Seperti dalam permainan lainnya, politik memiliki aturan main yang harus diikuti, yang berbentuk konstitusi, hukum, dan norma sosial. Aturan-aturan ini tidak hanya memberikan batasan, tetapi juga menyediakan pedoman bagi para aktor politik dalam mengelola kekuasaan dan kebijakan yang mereka buat. Namun, berbeda dengan permainan yang bersifat statis, politik adalah arena yang senantiasa berubah, dipengaruhi oleh dinamika sosial, ekonomi, dan budaya.

Menggambarkan politik sebagai permainan bukan hanya soal persaingan untuk memperoleh kekuasaan. Lebih dari itu, ia mencakup strategi dan adaptasi dalam meraih tujuan jangka panjang. Setiap aktor politik, seperti halnya dalam permainan, harus memiliki strategi yang matang, tidak hanya untuk menghadapi lawan, tetapi juga untuk berkolaborasi dan bernegosiasi dengan aktor politik lainnya yang memiliki tujuan yang berbeda. Kerja sama dan persaingan berjalan berdampingan dalam politik, menciptakan sebuah proses yang penuh dengan kalkulasi dan kompromi. Politik, sebagai arena strategis, tidak hanya menyajikan kompetisi untuk merebut kekuasaan, tetapi juga menawarkan peluang bagi para aktor untuk beradaptasi, berkolaborasi, dan menavigasi ketegangan yang ada dalam masyarakat.

Dalam permainan politik, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh siapa yang paling pintar berkompetisi, tetapi juga oleh siapa yang mampu membangun koalisi, mengelola aliansi, dan mengoptimalkan

sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan bersama. Sebagaimana dalam setiap permainan yang memiliki aturan dan strategi, politik juga bekerja di dalam batasan yang ditentukan oleh sistem hukum dan norma yang ada. Namun, dalam praktiknya, batasan-batasan ini tidak selalu statis; mereka sering kali berubah dan beradaptasi dengan perubahan dalam dinamika politik, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, para aktor politik yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan ini, dan yang mampu merumuskan strategi jangka panjang, akan memiliki keunggulan dalam meraih tujuan mereka.

Namun, pertanyaannya adalah, apa yang dipertaruhkan dalam permainan politik ini? Lebih dari sekadar kekuasaan, politik adalah tentang pengaruh yang dapat memengaruhi arah kebijakan dan masa depan suatu negara. Setiap keputusan yang diambil oleh aktor politik memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, oleh karena itu keberlanjutan negara dan kesejahteraan rakyat menjadi bagian dari tujuan yang lebih besar. Politik bukan hanya tentang siapa yang memenangkan kekuasaan, tetapi juga bagaimana kekuasaan itu digunakan untuk menciptakan kebijakan yang membawa dampak positif bagi masyarakat luas.

Dengan demikian, politik adalah permainan yang kompleks, di mana aktor politik berkompetisi dan berkolaborasi untuk meraih tujuan yang lebih besar. Aturan main—konstitusi, hukum, dan norma—memberikan struktur yang mengarahkan perjalanan politik, tetapi di saat yang sama, aktor politik harus memiliki kemampuan untuk membaca perubahan keadaan dan menyesuaikan strategi mereka. Politik, lebih dari sekadar permainan yang melibatkan kompetisi, adalah arena yang memungkinkan perubahan, adaptasi, dan penciptaan kebijakan yang akan memengaruhi banyak kehidupan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang dinamika politik dan strategi yang digunakan di dalamnya menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana kekuasaan dikendalikan dan bagaimana kebijakan dapat diubah untuk mencapai tujuan jangka panjang yang lebih baik.

1.1 Politik sebagai Arena Strategis

Politik, sebagaimana diungkapkan dalam banyak literatur, sering kali dipandang sebagai arena kompetitif yang penuh dengan

strategi. Namun, untuk benar-benar memahami politik sebagai arena strategis, kita harus mengakui bahwa persaingan untuk mendapatkan kekuasaan adalah aspek yang paling nyata, tetapi juga bukan satu-satunya elemen dalam permainan ini. Strategi dalam politik jauh lebih kompleks dan multidimensional, melibatkan bukan hanya persaingan, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi, bekerja sama, dan mengelola berbagai kekuatan yang ada.

Penting untuk dipahami bahwa dalam dunia politik, tidak ada ruang yang statis. Situasi politik sangat dinamis, dengan kekuatan dan kepentingan yang selalu bergerak dan berubah. Oleh karena itu, aktor politik—baik individu, partai, atau lembaga—harus memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan situasi. Di sinilah unsur strategis dalam politik sangat ditekankan. Seperti dalam permainan catur, di mana seorang pemain harus tidak hanya memikirkan langkahnya sendiri tetapi juga memprediksi langkah lawan dan menyesuaikan strategi dengan cepat, dalam politik, aktor harus bisa mengantisipasi dan merespons dinamika yang terjadi di sekitar mereka. Sebagaimana dikemukakan oleh Tilly (2007), politik adalah arena yang penuh dengan ketegangan dan perubahan, yang memerlukan fleksibilitas dan kemampuan membaca situasi secara tajam.

Lebih lanjut, politik sebagai arena strategis juga berarti bahwa permainan ini melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang beragam. Setiap aktor politik berusaha untuk mencapai tujuan mereka, namun tujuan tersebut sering kali bertabrakan dengan tujuan aktor lain. Oleh karena itu, salah satu strategi utama dalam politik adalah membangun aliansi. Dalam konteks ini, kerja sama dan koalisi bukanlah hal yang bertentangan dengan kompetisi, tetapi merupakan bagian integral dari permainan itu sendiri. Untuk mendapatkan kekuasaan atau meraih kebijakan yang menguntungkan, aktor politik sering kali harus bernegosiasi, melakukan kompromi, dan berkolaborasi dengan aktor lain yang memiliki kepentingan berbeda. Sebagaimana dijelaskan oleh Machiavelli (1532), kemampuan untuk beradaptasi dan bernegosiasi dalam berbagai situasi merupakan ciri khas dari pemimpin yang sukses dalam politik.

Namun, kerja sama dalam politik tidak selalu bersifat permanen. Aliansi politik bisa berubah seiring berjalannya waktu,

tergantung pada kepentingan jangka pendek atau panjang yang dimiliki oleh aktor-aktor tersebut. Seperti dalam permainan strategi lainnya, kesempatan untuk berkolaborasi datang dan pergi, dan para pemain harus bijak dalam memanfaatkannya. Koalisi yang dibentuk untuk memenangkan pemilu atau meraih posisi tertentu tidak selalu bertahan dalam jangka panjang, karena politik adalah dunia yang selalu berubah. Tilly (2007) mencatat bahwa dalam politik, koalisi yang terbentuk sering kali rapuh dan dapat terpecah, tergantung pada bagaimana kepentingan jangka panjang dipertaruhkan dan bagaimana perubahan dalam opini publik dapat memengaruhi arah kebijakan.

Selain itu, kepemimpinan politik dalam arena ini sangat bergantung pada kemampuan untuk memanipulasi berbagai sumber daya yang tersedia. Sumber daya tersebut tidak hanya terbatas pada kekuasaan formal, seperti jabatan atau kewenangan hukum, tetapi juga meliputi dukungan sosial, informasi, dan kemampuan mengontrol narasi publik. Media, dalam konteks ini, memiliki peran penting sebagai alat yang dapat digunakan untuk memengaruhi opini publik dan menciptakan citra positif bagi aktor politik, yang pada gilirannya memengaruhi keputusan politik dan pilihan pemilih. Oleh karena itu, politik sebagai arena strategis juga tentang pengelolaan informasi dan kekuatan narasi. Politik tidak hanya melibatkan pengambilan keputusan yang rasional, tetapi juga kemampuan untuk mengendalikan persepsi publik dan membentuk opini yang dapat mendukung atau merugikan posisi seorang aktor politik.

Strategi dalam politik juga sangat bergantung pada kemampuan untuk mengelola ketegangan dan konflik. Dalam banyak kasus, politik bukan hanya soal mencapai kesepakatan atau meraih kemenangan melalui kompetisi langsung. Politik sering kali melibatkan pertempuran simbolik, di mana aktor-aktor politik tidak hanya berjuang untuk kebijakan, tetapi juga untuk mengendalikan persepsi publik terhadap suatu isu atau kebijakan. Konflik-konflik ini bisa terjadi baik dalam ruang publik—seperti debat di media—maupun dalam ruang tertutup—seperti di dalam ruang rapat atau pertemuan internal partai. Oleh karena itu, strategi dalam politik juga mencakup kemampuan untuk mengelola persepsi dan narasi yang beredar, selain hanya berfokus pada hasil akhir kebijakan. Hal ini mengacu

pada konsep strategi komunikasi politik yang dijelaskan oleh Arendt (1958), di mana kontrol atas narasi sosial menjadi kunci dalam mengelola ketegangan politik yang ada.

Pada akhirnya, politik sebagai arena strategis lebih dari sekadar kompetisi yang melibatkan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Politik juga tentang mengelola dinamika sosial, menggunakan sumber daya yang ada, serta beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang cepat. Dalam hal ini, aktor politik yang mampu berpikir jangka panjang, menjaga aliansi yang kuat, dan memiliki keahlian dalam memanfaatkan berbagai alat strategis (baik formal maupun informal) akan lebih berhasil dalam memenangkan “permainan” politik ini. Politik bukan hanya tentang merebut kekuasaan, tetapi juga tentang perjuangan untuk memengaruhi, membentuk, dan mengontrol kebijakan yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya.

1.2 Dinamika Politik: Kerja Sama dan Persaingan

Salah satu elemen yang paling menarik dari politik sebagai arena strategis adalah bagaimana kerja sama dan persaingan berjalan berdampingan dalam memengaruhi proses pembuatan kebijakan. Sering kali, politik dianggap hanya sebagai arena kompetisi—di mana aktor politik berjuang untuk mendapatkan kekuasaan dan mencapai tujuan mereka. Namun, dalam kenyataannya, politik jauh lebih kompleks dan sering kali memerlukan lebih dari sekadar persaingan langsung. Kerja sama antaraktor politik memainkan peran kunci dalam menghasilkan kebijakan yang stabil dan efektif.

Dalam banyak sistem politik, koalisi menjadi hal yang sangat penting, terutama dalam sistem pemerintahan demokratis, di mana tidak ada satu pihak yang dapat meraih kekuasaan mutlak tanpa dukungan dari aktor lain. Misalnya, dalam konteks sistem multipartai, koalisi antara berbagai partai politik sering kali diperlukan untuk membentuk pemerintahan yang stabil. Sebagai contoh, di negara-negara dengan sistem parlementer, di mana mayoritas kursi di parlemen diperlukan untuk membentuk pemerintahan, koalisi antara partai yang memiliki ideologi berbeda adalah hal yang umum.

Namun, kerja sama dalam politik tidak selalu mulus dan sering kali dibarengi dengan persaingan yang intens. Setiap partai politik

atau kelompok dalam koalisi mungkin memiliki agenda yang berbeda, yang bisa menimbulkan ketegangan dalam proses pembuatan keputusan. Dalam hal ini, aktor politik harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi, bernegosiasi, dan berkompromi agar bisa menjaga stabilitas koalisi tanpa mengorbankan tujuan mereka yang lebih besar. Negosiasi dan kompromi menjadi elemen penting dalam politik, di mana masing-masing pihak harus menerima kenyataan bahwa tidak semua kebijakan yang diinginkan bisa diwujudkan dalam satu waktu.

Konsep konsensus dalam politik juga sangat penting untuk memahami dinamika kerja sama dan persaingan ini. Konsensus bukan berarti kesepakatan mutlak, tetapi lebih pada pencapaian titik temu di mana semua pihak dalam koalisi bisa menerima kebijakan yang diusulkan meskipun mungkin ada bagian-bagian yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak. Konsensus ini menunjukkan bahwa dalam politik, terkadang kemenangan terbesar bukan datang dari mengalahkan lawan secara langsung, tetapi dari menciptakan kesepakatan yang memungkinkan tercapainya tujuan bersama. Hal ini sesuai dengan pandangan Liberalisme Politik, yang menekankan pentingnya kerja sama antaraktor dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas politik.

Namun, persaingan tetap tidak bisa dihindari dalam politik. Setiap aktor politik tetap memiliki tujuan untuk meraih posisi yang menguntungkan, baik itu dalam konteks kebijakan atau pengaruh sosial. Bahkan dalam koalisi, persaingan bisa muncul di tingkat individu atau fraksi-fraksi yang ada di dalamnya. Misalnya, dalam pemerintahan koalisi, meskipun ada kerja sama antarpartai, tidak jarang terjadi pertentangan dalam hal siapa yang berhak menduduki posisi-posisi strategis atau siapa yang memiliki kekuatan dalam menentukan kebijakan utama. Dalam konteks ini, kompetisi internal dalam koalisi menjadi bagian dari dinamika politik yang harus dikelola dengan hati-hati untuk menjaga kestabilan pemerintahan.

Persaingan juga sangat terlihat dalam proses pemilihan umum (pemilu), di mana partai politik dan calon kandidat berusaha menarik dukungan sebanyak mungkin dari pemilih. Dalam pemilu, selain persaingan antarpartai politik, sering kali terjadi persaingan antarindividu di dalam partai itu sendiri, atau bahkan antarkelompok dalam pemerintahan yang sedang berjalan. Strategi

kampanye menjadi instrumen penting dalam persaingan ini, di mana aktor politik menggunakan media untuk menyampaikan pesan, mengembangkan citra positif, atau bahkan menyerang rival politik mereka untuk mendapatkan keuntungan dalam pemilu. Sebagai contoh, dalam pemilu Indonesia, penggunaan media sosial dan iklan politik telah menjadi sarana utama untuk memperkenalkan calon dan memenangkan dukungan publik, yang mengarah pada perubahan besar dalam strategi politik tradisional.

Namun, meskipun persaingan ini tampak mengarah pada konflik dan ketegangan, politik juga mengajarkan kita bahwa kerja sama tetap menjadi kunci untuk mencapainya. Bahkan dalam keadaan persaingan yang intens, politisi sering kali menyadari bahwa mereka tidak bisa meraih tujuan mereka tanpa membangun koalisi atau aliansi dengan aktor lain. Dalam banyak kasus, kerja sama sementara dalam menghadapi tantangan yang lebih besar dapat menjadi jembatan untuk mengatasi hambatan dan menciptakan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Hal ini sesuai dengan pandangan konstruktivisme, yang menunjukkan bahwa hubungan antaraktor politik sering kali dipengaruhi oleh nilai-nilai ideologis dan identitas sosial mereka, yang memengaruhi pilihan strategi dan kebijakan yang mereka buat.

Akhirnya, dinamika antara kerja sama dan persaingan ini menggambarkan bahwa politik adalah proses yang kompleks dan terus berkembang, yang membutuhkan para aktor politik untuk beradaptasi, bernegosiasi, dan membuat keputusan strategis yang sesuai dengan situasi yang ada. Kompetisi untuk mendapatkan kekuasaan dan posisi yang menguntungkan tetap menjadi aspek yang dominan, tetapi kerja sama untuk menciptakan kebijakan yang stabil dan efektif tidak dapat dipandang sebelah mata. Dalam praktiknya, keberhasilan dalam politik sering kali bergantung pada kemampuan aktor politik untuk menyeimbangkan kerja sama dan persaingan demi mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

1.3 Perspektif Teoretis dalam Politik Pemerintahan

Untuk memahami politik sebagai arena strategis, kita perlu mengadopsi berbagai perspektif teoretis yang menjelaskan mengapa aktor-aktor politik bertindak seperti yang mereka lakukan.

Salah satu perspektif yang dominan adalah Realisme Politik, yang menempatkan kekuasaan sebagai elemen utama dalam dinamika politik. Perspektif ini menganggap bahwa politik adalah perjuangan untuk kekuasaan, di mana setiap aktor politik—baik negara, individu, atau kelompok—berusaha memperbesar posisi mereka dalam hierarki kekuasaan. Dalam pandangan ini, kerja sama antara aktor politik sering kali bersifat pragmatis dan sementara, tergantung pada kepentingan bersama yang mendalam.

Liberalisme Politik, di sisi lain, menganggap bahwa meskipun ada persaingan dalam politik, kerja sama antaraktor, yang difasilitasi oleh institusi politik, sangat penting dalam menciptakan stabilitas dan perdamaian. Dalam perspektif ini, politik adalah tentang mencapai konsensus yang dapat menguntungkan semua pihak, terutama dalam konteks negara demokratis, di mana institusi politik memainkan peran penting dalam mengatur interaksi antaraktor dan mendorong mereka untuk bekerja sama demi kepentingan umum.

Sementara itu, konstruktivisme melihat politik sebagai arena di mana norma, identitas, dan ideologi membentuk perilaku aktor politik. Dalam perspektif ini, aktor politik tidak hanya bertindak berdasarkan kepentingan material atau kekuasaan semata, tetapi juga oleh nilai-nilai ideologis dan identitas sosial yang diyakini oleh mereka. Politik, dalam pandangan ini, adalah tentang membangun narasi dan identitas sosial yang dapat memengaruhi persepsi publik terhadap isu atau kebijakan tertentu.

Ketiga perspektif ini memberikan pandangan yang berbeda namun saling melengkapi dalam memahami dinamika politik sebagai arena yang penuh dengan strategi, kerja sama, dan konflik. Mereka menggarisbawahi pentingnya kekuasaan, kerja sama, dan identitas dalam proses pengambilan keputusan politik yang memengaruhi kebijakan dan kehidupan masyarakat. Dengan memadukan perspektif ini, kita dapat mendapatkan pemahaman yang lebih kaya dan kompleks tentang bagaimana politik dijalankan di dunia nyata.

1.4 Batasan Aturan Main dan Fleksibilitas Strategi

Selain kerja sama dan persaingan, peran aturan main dalam politik juga sangat krusial. Aturan main ini, yang meliputi konstitusi, hukum, dan norma sosial, memberikan kerangka kerja bagi tindakan aktor politik. Mereka menentukan apa yang sah dan tidak sah, apa yang bisa dilakukan, dan apa yang harus dihindari. Namun, dalam beberapa kasus, aktor politik juga sering berusaha untuk mengubah aturan main itu sendiri melalui strategi yang lebih agresif, seperti perubahan konstitusi atau perubahan hukum.

Sebagai contoh, jika seorang aktor politik merasa bahwa aturan yang ada menghambat pencapaian tujuannya, mereka dapat berusaha mengubah hukum atau konstitusi untuk menciptakan kondisi yang lebih menguntungkan bagi mereka. Reformasi hukum ini tidak selalu dilakukan dengan niat buruk, tetapi sering kali bertujuan untuk memperbaiki sistem yang dianggap tidak lagi relevan atau terlalu membatasi dalam menghadapi tantangan baru. Namun, perubahan-perubahan ini sering kali menciptakan ketegangan dalam politik, karena dapat mengubah struktur kekuasaan yang ada dan menguntungkan pihak tertentu sementara merugikan pihak lain. Oleh karena itu, meskipun ada ruang untuk mengubah hukum dan norma, proses ini memerlukan strategi yang matang untuk menghindari ketidakstabilan politik dan memastikan bahwa perubahan tersebut diterima oleh mayoritas aktor politik.

Selain itu, strategi dalam batasan hukum dan norma juga sering kali melibatkan taktik untuk memanfaatkan ruang yang tersedia dalam kebijakan atau regulasi yang ada. Ini bisa berarti memanfaatkan kelonggaran yang diberikan oleh hukum, atau memanipulasi interpretasi hukum untuk memajukan agenda politik. Sebagai contoh, dalam sistem politik yang sangat birokratis, aktor politik dapat memanfaatkan peraturan administratif untuk melaksanakan kebijakan tanpa melibatkan perubahan besar dalam undang-undang atau konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum dan norma sering memberikan keluwesan dalam penerapan kebijakan, yang dapat dimanfaatkan oleh aktor politik untuk mencapai tujuan mereka dengan cara yang sah, tetapi tetap menguntungkan.

Dengan demikian, meskipun hukum dan norma memberikan batasan yang jelas bagi aktor politik dalam pengambilan keputusan,